

HALAMAN JUDUL

**PERAN LAMA PIDANA, USIA PELAKU, DAN TEKANAN
WAKTU TERHADAP PENILAIAN KEADILAN PEMIDANAAN
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam
Ilmu Psikologi



Fathul Lubabin Nuqul
NIM: 06/09-I/1981/PS

**PROGRAM DOKTOR PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2014**

ABSTRACT

Justice is goal of law enforcement. Judge is an important instrument in the enforcement of criminal justice in Indonesian. The judge has the potential to bias in the assessment of a criminal case. From some research on judge's judgment and decision making (eg Probowati, 2003) shows about it. However, not much research in the psychological assessment process in the High Court Judge Justice. Rape is a crime of gender bias. The effect is fatal for the victims of rape and rape crimes from year to year to show improvement. Criminal justice assessment is the starting point in the decision. Theoretically assessment of criminal justice the perpetrators of rape are affected by the length of the criminal court, the age of the perpetrator, and the time given by the judge. This study used three experiments carried out serially. The variables has involved Length of criminal sentence (15 years, 5 years and acquittal), age of rapist (39 years old and 12 years old), and time pressure as independent variables. Sexism as co variable. Judgement of retributive justice, restorative justice and procedural justice as dependent variables. As many as 598 people subject to the inclusion of the character an accredited Law School student at least B, and has taken courses in Criminal Law. The measurement used is retributive, restorative and procedural justice scale and ambivalent sexism scale (Benevolent sexism and Hostile sexism). The results shown Length of criminal sentence, age of rapist, and time pressure has influence toward judgment of retributive justice and retributive justice, but no toward procedural justice. In all independent variables, sexism has not influence.

Key Words: Rape, Sentencing, Offender age, Time Pressure, retributive justice, restorative justice, procedural justice , Sexism.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	26
C. Tujuan Penelitian	27
D. Manfaat Penelitian	27
E. Keaslian Penelitian.....	28
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	30
A. Penilaian Keadilan Pemidanaan.....	30
1. Sistem Hukum Pidana Indonesia.	30
2. Pengertian Keadilan.....	34
3. Bentuk Keadilan Pemidanaan	38
4. Teori Penilaian Keadilan Pemidanaan.....	46
5. Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Keadilan Retributif	54
6. Faktor yang mempengaruhi Penilaian keadilan Restoratif.....	64
7. Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Keadilan Prosedural.	66
B. Lama Pidana.....	68
C. Usia Pelaku.....	76
1. Usia Pelaku Sebagai Dasar Penilaian Pertanggung Jawab Pidana (<i>Criminal Responsibility</i>).....	80
2. Pertanggung Jawaban Pidana di Berbagai Negara	84
3. Pertanggung Jawaban Pidana dalam Hukum Indonesia	86
D. Tekanan Waktu dan Penilaian Keadilan.....	93

E.	<i>Sexism</i>	95
1.	Pengertian <i>Sexism</i>	95
2.	Ambivalent <i>Sexism</i>	96
3.	Implikasi <i>Sexism</i> terhadap penilaian keadilan kejahatan pemerkosaan.....	99
F.	Tindak Pidana Pemerkosaan	101
G.	Landasan Teori	107
1.	Penilaian Keadilan Retributif.	107
2.	Penilaian Keadilan Restoratif	135
3.	Penilaian Keadilan Prosedural.	143
H.	Hipotesis.	150
BAB III: METODE PENELITIAN.....		151
A.	Variabel.....	151
1.	Identifikasi Variabel.	151
2.	Definisi Operasional.....	151
B.	Subjek Penelitian	153
C.	Desain Penelitian	155
1.	Rancangan Penelitian.....	155
2.	Prosedur Eksperimen.....	157
3.	Manipulasi.....	159
D.	Alat Pengumpul Data	161
1.	Skala Penilaian Keadilan.....	161
2.	Skala <i>Sexism</i>	163
3.	Wawancara	165
E.	Analisis Data.	165
BAB IV: HASIL PENELITIAN		167
A.	Deskripsi Subjek	167
B.	Paparan Data.....	167
1.	Penilaian Keadilan Retributif.	167
2.	Penilaian Keadilan Restoratif	184
3.	Penilaian Keadilan Prosedural.	200
4.	Hasil Wawancara	215
C.	Uji Hipotesis	219

BAB V: PEMBAHASAN	223
A. Penilaian Keadilan Retributif	223
1. Pengaruh Lama Pidana Terhadap Penilaian Keadilan Retributif	223
2. Pengaruh Lama Pidana dan Usia Pelaku Terhadap Penilaian Keadilan Retributif	228
3. Pengaruh Lama Pidana, Usia Pelaku dan Tekanan Waktu Terhadap Penilaian Keadilan Retributif	232
B. Penilaian Keadilan Restoratif	234
1. Pengaruh Lama Pidana Terhadap Penilaian Keadilan Restoratif	234
2. Pengaruh Lama Pidana dan Usia Pelaku Terhadap Penilaian Keadilan Restoratif	235
3. Pengaruh Lama Pidana, Usia Pelaku dan Tekanan Waktu Terhadap Penilaian Keadilan Restoratif	240
C. Penilaian Keadilan Prosedural	242
1. Pengaruh Lama Pidana Terhadap Penilaian Keadilan Prosedural	242
2. Pengaruh Lama Pidana dan Usia Pelaku Terhadap Penilaian Keadilan Prosedural	244
3. Pengaruh Lama Pidana, Usia Pelaku dan Tekanan Waktu Terhadap Penilaian Keadilan Prosedural	247
BAB VI: PENUTUP	249
A. Simpulan	249
B. Keterbatasan Penelitian	251
C. Saran	252
DAFTAR PUSTAKA	255
SUMMARY	272
RINGKASAN	311
Lampiran : Instrument Pengukuran	357
Lampiran : Data Eksperimen 1	368
Lampiran: Data Eksperimen 2	372
Lampiran: Data Eksperimen 3	379
Lampiran: Uji Reliabilitas	393
Lampiran Hasil Uji Analisis Faktor	396
Lampiran Hasil Analisis Penilaian Keadilan Retributif	415
Lampiran Hasil Analisis Penilaian Keadilan Restoratif	421
Lampiran Hasil Analisis Penilaian Keadilan Prosedural	427

Lampiran : Transkrip Wawancara	434
Lampiran: Daftar Putusan	441
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	442

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum di Indonesia melibatkan pemeriksaan polisi, jaksa sampai hakim, untuk menentukan pelaku bersalah atau tidak dan kemudian memutuskan pidana pelaku. Putusan yang tertuang dalam vonis Hakim Pengadilan Negeri (PN). Tidak otomatis putusan hakim memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang terlibat, baik terdakwa atau mungkin jaksa, yang merupakan “wakil” korban. Jika terjadi ketidakpuasan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) ini, maka pihak yang bertikai, diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum biasa, baik berupa banding ke pengadilan tinggi maupun kasasi ke mahkamah agung. Hal ini tertuang dalam pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana):

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

Aturan tersebut memberikan peluang untuk melakukan upaya banding, jika sebuah putusan Hakim Pengadilan Negeri dianggap kurang memuaskan. Dalam upaya penyikapan yang proporsional atas putusan pengadilan telah diatur dalam KUHAP. Ada beberapa tingkatan upaya hukum yaitu upaya hukum biasa yaitu banding ke pengadilan tinggi atau bahkan kasasi ke mahkamah agung. Ada pula upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK). Upaya-upaya hukum ini merupakan fasilitas guna mencapai keadilan (Ali, 2009).

Proses banding akan dilakukan di pengadilan tinggi dalam wilayah hukum pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Dalam proses pemeriksaan tingkat banding yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar dari penyidik, berita acara pemeriksaan yang di sidang, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan KUHAP pasal 238.

Ketentuan di KUHAP, sudah jelas, bahwa proses pemeriksaan di pengadilan tinggi “hanya” merupakan pemeriksaan berkas-berkas persidangan dan penyidikan. Hal ini tentu berbeda dengan pemeriksaan dalam pengadilan negeri yang menghadirkan barang bukti, saksi, saksi ahli, korban dan terdakwa. Hal ini memberikan suasana psikologis dalam proses persidangan dan pemeriksaan yang berbeda. Pada pengadilan negeri seorang hakim bisa mengamati raut muka penyesalan, gestur dan ras terdakwa, juga bisa kondisi pelaku, sedangkan pada pengadilan tinggi tidak bisa dilakukan.

Aturan dan tata laksana pemeriksaan di pengadilan tinggi menyiratkan sebuah pertanyaan. Bagaimana majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri telah dianggap adil atau tidak. Penelitian tentang proses penilaian keadilan pada Hakim Pengadilan Tinggi merupakan hal yang menarik, Proses ini penting dalam sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Keadilan merupakan bagian penting dalam proses hukum pidana, tetapi keadilan merupakan poin yang susah untuk diukur. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif, karena keadilan menyangkut nilai etis yang dianut oleh

masing-masing individu (Ali, 2009). Faturochman, (2002) mengatakan keadilan akan sulit didefinisikan tanpa ada konteks sosial yang jelas. Untuk itu keadilan bisa lebih mudah jika dikaitkan dengan konteks sosial tertentu. Keadilan sosial mempunyai dua sisi yang objektif dan subjektif. Keadilan objektif terkait dengan kapasitas untuk menyesuaikan dengan standar normatif yang berlaku sehingga bias dan prasangka bisa direduksi seminimal mungkin (Faturochman, 2002).

Keadilan subjektif terkait dengan penilaian atau persepsi individu tentang keadilan. Penilaian keadilan merupakan rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu kata penilaian dan keadilan. oleh karena itu perlu juga mengetahui tentang pengertian penilaian yang merupakan *output* dari persepsi.

Penilaian keadilan pembedaan pelaku kejahatan pada pengadilan tinggi, mempunyai konsep yang sedikit berbeda. Hal ini, seperti yang dikemukakan di atas, bahwa dalam proses penilaian keadilan di pengadilan tinggi “hanya” memeriksa dokumen-dokumen semata, sehingga interpretasi dari prosedur yang telah dilaksanakan selama persidangan di pengadilan negeri menjadi sangat sentral. Untuk itu penilaian subjektif tentang keadilan yang telah diputuskan cukup berperan dalam proses peradilan di pengadilan tinggi ini.

Keadilan adalah tujuan dari seluruh proses hukum, pada tiap tingkat pengadilan, mulai dari hukum pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai mahkamah agung. Hakim merupakan aktor utama dari tercapainya tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 disebutkan bahwa:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Hakim dalam memberikan keputusan harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, jujur dan tidak memihak. Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak selamanya memberikan putusan yang sama untuk kasus kejahatan yang sama. Hal ini diistilahkan dengan disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan antar hakim merupakan masalah hukum yang pelik. Masalah ini menjadi pembicaraan dalam Musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan Jawa Timur, Munas VIII Ikatan Hakim Indonesia di Jakarta 1984 dan Simposium terbatas tentang pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 1992. Disparitas pemidanaan hakim tentu akan mengurangi kepastian keadilan dalam pemidanaan, karena seseorang akan melakukan perbandingan antar putusan dalam kasus yang sama (Probawati 2001). Tidak tercapainya rasa keadilan ini, menimbulkan penilaian bahwa hakim dalam penegakan hukum pidana dianggap kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara (Anwar & Adang, 2009). Akhirnya akan menurunkan legitimasi pada institusi hukum dan aturan sosial yang akhirnya akan membuat tatanan sosial mengalami masalah (Tyler 2006),

Disparitas pemidanaan hakim sangat didominasi oleh keyakinan yang secara empiris sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis (Probawati, 2007). Disparitas pemidanaan dapat terjadi karena tidak adanya standar profesi hakim dalam

memberikan pidana. Hakim dalam memutuskan pidana memiliki patokan batas minimal-maksimal pidana dalam KUHP. Pengambilan keputusan yang berbeda dari hakim juga dipengaruhi oleh kebebasan hakim.

Disparitas pidana bisa disebabkan adanya perbedaan filosofi antar hakim terkait dengan aliran pidana. Ada tiga aliran pidana (Taft & England dalam Probowati, 2001):

- a. Aliran klasik. Dengan tokohnya Cesare yang mengajarkan ajaran yang memuja pidana sebagai sarana ampuh untuk mengatasi kejahatan. Pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan sama sekali tidak diizinkan adanya perbedaan pidana.
- b. Aliran modern, Lambroso merupakan salah satu pelopor aliran ini. Aliran ini mengajarkan pemberian pidana yang bergantung dari kasus kriminal. Artinya setiap pelaku kejahatan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Suatu kebobrohan jika penetapan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Aliran modern berkembang menjadi aliran yang bertujuan pada pencegahan.
- c. Aliran Neo Klasik. Aliran ini berkembang pada abad 19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik tetapi dengan melakukan modifikasi. Modifikasi yang dilakukan antara lain diterimanya asumsi bahwa penyebab kejahatan dapat karena patologis, ketidak mampuan dan penyakit jiwa. Diterimanya keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidana baik fisik lingkungan maupun mental. Juga dilakukan modifikasi pertanggung jawaban pidana dengan pertanggung jawaban sebagian dalam keadaan khusus

karena gila, dibawah umur dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang dalam melakukan kejahatan. Diperkenalkannya saksi ahli sebagai penentu derajat pertanggung jawaban pidana.

Disparitas pembedaan mulai akan muncul jika hakim menggunakan pendekatan modern yang memperbolehkan adanya perbedaan pembedaan. Begitu juga dengan pandangan neo klasik, pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan menjadi pemicu semakin besarnya disparitas pembedaan yang ada. Sebagai contoh dalam persidangan seorang hakim akan mendapatkan informasi dari jaksa tentang pasal-pasal yang didakwakan pada pelaku anak. Pasal yang digunakan oleh jaksa mempunyai beberapa kemungkinan dari pasal dari KUHP atau UU Perlindungan Anak. Selain jaksa, hakim juga akan mendengarkan dari saksi ahli untuk mendapatkan informasi tentang derajat pertanggung jawaban pidana pelaku. Banyaknya informasi yang harus diserap oleh hakim semakin membuat rentang disparitas pembedaan makin lebar.

Dalam penyerapan informasi dan data, seseorang dipengaruhi oleh nilai, pengalaman, informasi terdahulu dan kondisi kekinian pada saat itu (Stenberg, 2008). Dalam kondisi yang seperti itu maka hakim rentang mengalami distorsi informasi dan kesalahan pengambilan keputusan yang berakibat ketidak puasan pada hasil persidangan, yang akhirnya akan menimbulkan rasa ketidakadilan pada putusan pidana hakim.

Penilaian keadilan pemidanaan meliputi keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan yang berbasis pada moral. Keadilan substantif bisa dibagi menjadi 2 yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif.

Keadilan retributif merupakan keadilan yang mengacu pada kelayakan pidana untuk pelaku kejahatan. Secara teoritik keadilan retributif lebih dekat dengan penegakan moral, dengan prinsip “nyawa bayar nyawa” (Finkerstein, 2002: Darley, 2009). Retributif juga dianggap sebagai keadilan balas dendam. Rasa ingin menghukum pelaku, merupakan dorongan yang harus dilampiaskan. Jika keinginan ini tidak terlampiaskan maka akan menjadi tekanan pada disonansi pada psikis individu (Vidmar, 2001). Manifestasi dari pendapat Vidmar ini adalah pidana yang berat akan semakin dinilai adil dibanding dengan pidana yang ringan. Lebih lanjut beberapa penelitian tentang beberapa penelitian tentang sikap menghukum menunjukkan bahwa kejahatan yang dianggap serius dianggap lebih pantas diberi pidana seberat-beratnya (Cullen, et. al. 1985: Rossi, Simpson & Miller, 1985: Mackey, & Courtright, 2000), begitu juga dengan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (Darley & Pitman, 2003)

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan pemidanaan untuk kemanfaatan pelaku, korban dan masyarakat (O'Hara, 2005: Tyler, 2006). Lebih lanjut O'Hara (2005) mengatakan bahwa keadilan restoratif lebih melihat masa depan daripada masa lalu. Penganut paradigma keadilan restoratif meyakini bahwa pelaku merupakan individu yang perlu dipulihkan sehingga diharapkan menjadi individu yang mampu hidup di masyarakat dengan baik (Tyler, 2006). Jadi penilaian keadilan restoratif lebih pada apakah putusan hakim benar-

benar akan memberikan efek perubahan positif pada korban, dan efek aman pada korban dan masyarakat, sehingga mungkin tidak harus memidanakan pelaku terlalu lama untuk pidana yang adil secara restoratif.

Berbeda dengan keadilan retributif dan keadilan restoratif yang lebih melihat pada hasil putusan, keadilan prosedural lebih melihat pada proses putusan hakim. Menurut Lind dan Tyler (1988) penilaian prosedur yang adil mengacu pada sejauh mana putusan hakim dilakukan secara terpercaya atau *legitimate*, mengedepankan unurnetralitas dan perlakuan yang baik untuk pelaku. Dalam tataran pelaksanaan hukum di Indonesia lebih mengacu azaz kepastian hukum. Kitab Undang-undang acara pidana telah merumuskan proses persidangan yang menjadi referensi dalam proses pengambilan putusan, agar putusan tersebut dinilai adil.

Di antara tindak kejahatan yang disidangkan dalam pengadilan, kasus pemerkosaan merupakan kasus yang banyak menimbulkan perdebatan dan menarik untuk diteliti. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Alasan pertama, persepsi yang berbeda antara penilaian masyarakat dan realita empiris tentang pemerkosaan. Dalam survei menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pemerkosaan sebagai kejahatan yang berbahaya. Pemerkosaan dianggap berpotensi mengalami pengulangan dan masyarakat menganggap bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa (Karen, 2003). Di sisi lain, Sample & Bray, (2003), mereview beberapa hasil studi sistematis yang membandingkan pemerkosaan dengan kejahatan lain seperti pencurian, perampokan. Ditemukan bahwa perampokan lebih berpotensi mengalami pengulangan atau residivism dibanding pemerkosaan.

Alasan yang kedua, dalam penegakan hukum pemerkosaan di Indonesia, terdapat banyak hal yang menimbulkan “gugatan” tentang keadilan dalam kasus ini karena; 1) Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku pemerkosaan selalu berjenis kelamin laki-laki dan korban selalu berjenis kelamin perempuan; 2) Pidana untuk pelaku pemerkosaan dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Misalnya pada pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa pidana maksimal 12 tahun penjara untuk pelaku pemerkosaan, sedangkan pada pasal 287 KUHP dijelaskan bahwa pidana maksimal pada pemerkosaan dengan korban yang berusia di bawah umur, selama 15 tahun (Moeljatno, 1996). Dasar hukum ini tentunya dianggap kurang memenuhi rasa keadilan karena korban anak-anak lebih rentan mengalami gangguan mental dari efek pemerkosaan dibanding dengan korban dewasa. Anak-anak lebih berpotensi menjadi korban dibanding dengan orang dewasa, karena mudah percaya dan terbujuk oleh orang dewasa. Pasal yang bias ini menimbulkan reaksi untuk memenuhi kebutuhan keadilan restoratif, jika melihat efek pemerkosaan terhadap korban khususnya anak-anak.

Dalam pengadilan kasus anak terkait dengan pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya menunjukkan adanya disparitas pembedaan. Data yang dirilis oleh Unicef Indonesia (2006), dengan menggunakan pasal penuntutan yang sama, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pelaku anak pelaku kejahatan seksual 1,5 -2 tahun sedangkan pada Pengadilan Negeri Kupang 4 – 8 tahun. Data ini menunjukkan bahwa hakim belum mempunyai standar penilaian keadilan yang berefek pada perbedaan pemberian pidana pada pelaku.

Bias pada penilaian kejahatan juga terjadi pada kasus pemerkosaan anak. Untuk membuktikan proses hukum kasus pelanggaran seksual dengan korban anak, penulis mentelaah dokumen *legal memorandum*. Dari telaah kasus tersebut menunjukkan adanya disparitas pembedaan atau perbedaan dalam vonis pembedaan antara 0 Tahun (bebas) sampai 9 tahun pada level pengadilan negeri. Begitupun juga pada level pengadilan tinggi, bahwa Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi cenderung tidak mengindahkan korban sebagai pertimbangan dalam membuat putusan pidana yang dijatuhkan pada korban terutama untuk majelis hakim yang memutus bebas, hal ini terungkap dalam salah satu memorandum putusan MA yang mengkritisi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sebagai berikut;

“Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memberikan putusan yang sangat tidak masuk akal, tanpa pertimbangan nurani dan akal sehat dan tanpa memikirkan bagaimana nasib dan masa depan saksi korban yang juga adalah anak tiri dari terdakwa. Apalagi pada masa sekarang ini begitu dihebohkan di masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kenyataannya, fakta yang telah terungkap secara jelas dan nyata pun akhirnya dikaburkan dengan putusan banding yang tidak masuk akal dan tanpa pertimbangan yang bisa dianalisa secara hukum” (Putusan MA, No. 465 K/Pid/2006)”

Pertimbangan majelis hakim MA di atas, merupakan peluang bagi hakim yang lain untuk mempertimbangkan aspek psikologis anak dimasa yang akan datang. Belum banyak putusan yang memperhatikan korban dalam membuat putusan oleh hakim, selain untuk alat bukti, semisal *visum et repertum*. Selebihnya kondisi psikologis anak sebagai korban hendaknya juga menjadi pertimbangan hakim, sebagai kapasitas hakim yang arif dan adil. Hakim sebagai tokoh sentral

dalam pengadilan mempunyai kewenangan untuk menganalisa fakta yang mungkin harus keluar dari konteks hukum demi keadilan bersama.

Belum banyak penelitian tentang bentuk-bentuk keadilan yang dianut oleh hakim khususnya dalam kasus pemerkosaan. Nilai keadilan yang dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri menentukan bentuk dan lama pidana yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Bagi Hakim Pengadilan Tinggi hal ini menentukan apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri dianggap adil atau tidak. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti ketiga bentuk keadilan (retributif, restoratif dan prosedural) dalam rangka untuk memahami keadilan mana yang lebih dianut oleh Hakim Pengadilan Tinggi di Indonesia, khususnya dalam memutus kasus pemerkosaan.

Problem empiris diatas menarik untuk diteliti, namun untuk meneliti proses-proses pada hakim sesungguhnya mempunyai kesulitan tersendiri pada ketersediaan subjek penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka untuk mendekatkan hasil penelitian simulatif yang mendekati dengan kondisi empiris. Dipilihlah mahasiswa hukum dengan kriteria telah mempelajari hukum pidana. Diharapkan dengan melibatkan mahasiswa hukum ini, subjek sudah lebih memahami tentang filosofi keadilan pembedaan dan proses hukum pidana yang dianut dalam aturan tata hukum Indonesia. Beberapa penelitian tentang penilaian dan pengambilan keputusan dalam pengadilan telah diujikan dengan melibatkan mahasiswa sebagai subjek penelitian (Bornstein, Rung, & Miller, (2002); Mueller-Johnson dan Dhami (2010); Kerr dan Hymes (1995); Okimoto, et. al., (2006); Willey & Bottoms, 2009)).

Secara teoritis banyak faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan. Aspek pribadi individu telah banyak diteliti terkait dengan sikap dan penilaian terhadap kejahatan dan pidana untuk pelaku. Misalnya Feather (1996;1998) meneliti tentang pengaruh moral yang termediasi dengan penilaian tanggung jawab pidana dan keseriusan kejahatan terhadap pidana yang layak untuk pelaku pelanggaran. Beberapa penelitian juga menemukan adanya pengaruh kepribadian penilai dengan pemberian pidana (Ryckman, Burn & Robbins, 1989; Probowati, 2001: 2007).

Khusus untuk kejahatan pemerkosaan juga diteliti terkait dengan *sexism*, Misalnya Cowan (2000) menemukan bahwa individu yang mempercayai bahwa pemerkosaan adalah kesalahan pelaku beranggapan pemerkosaan disebabkan oleh keadaan yang dialami oleh laki-laki seperti *Male dominance, male sexuality, male* dan *male pathology*. Individu yang seperti ini cenderung untuk menghukum pemerkosa lebih berat. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Gray (2006).

Dari hasil penelitian tentang aspek pribadi individu penilai dapat disimpulkan bahwa pribadi penilai berperan dalam penilaian keadilan pidana, tetapi belum banyak yang menjelaskan apa bentuk keadilan yang paling tepat untuk pelaku kejahatan pemerkosaan anak.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kasus, pelaku, korban dan faktor situasi juga mempengaruhi. Beberapa penelitian menguatkan pendapat tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bornstein & Miller (2002) tentang ekspresi penyesalan korban dengan pemberian pidana. Usia pelaku, korban juga mempengaruhi penilaian pemberian perlakuan apakah dipidana atau di rehabilitasi (Roger, 2004; Modecki, 2008).

Faktor suasana kerja, mempengaruhi penilaian kasus kejahatan. Gordon & Anderson (1995), dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa menunjukkan tekanan waktu cenderung meningkatkan penilaian keseriusan kejahatan dan meningkatkan keinginan untuk menghukum. Kaitan antara tekanan waktu dan keinginan untuk memberikan pidana ini dimediasi oleh *stereotype* pada pelaku. Lebih lanjut Brown & Miller (2000) menjelaskan bahwa suasana kerja dalam tekanan waktu membuat individu cenderung berfikir sempit, tidak menggali informasi lebih atau cenderung berfikir heuristik.

Dalam kenyataannya, majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam bersidang dibatasi oleh waktu untuk melakukan penilaian dan membuat keputusan pada kasus tertentu. Hal ini tidak mudah karena selain adanya tekanan waktu, jumlah kasus yang ditangani juga cukup banyak dan bervariasi. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk melihat peran dari faktor kasus seperti lama pidana, usia pelaku dan faktor suasana kerja tekanan waktu serta faktor internal penilai, terhadap penilaian keadilan pemidanaan pelaku pemerkosaan yang meliputi keadilan retributif, keadilan restoratif dan keadilan prosedural.

Kaitan antara nilai individu dan pemidanaan juga tergambar dari *deservingness model* dari Feather (1996: 1998). Lebih lanjut Feather mengemukakan bahwa kaitan antara nilai dan pidana yang adil, dimediasi oleh penilaian keseriusan kejahatan yang terjadi dan penilaian tanggung jawab pidana pelaku. Pada kejahatan pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan yang berat dan berpotensi terjadi pengulangan (Karen 2003), sehingga pelaku pemerkosaan dianggap layak untuk diberikan pidana yang berat.

Disisi lain dalam *Deservingness model* Feather (1998) juga melibatkan penilaian tanggung jawab pidana, hal ini berimplikasi keharusan untuk melihat latar belakang pelaku. Dalam undang-undang pidana Indonesia, terdapat pasal pengecualian, artinya ada beberapa kelompok pelaku yang disebutkan dalam undang-undang tersebut akan mendapatkan pemaafan (divonis lepas) atau keringanan pemidanaan. Kelompok yang disebutkan dalam KUHP tersebut adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, dan anak-anak. Pada kelompok ini dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan secara sengaja. Jika melakukan kejahatanpun umumnya karena ketidak sengajaan atau didorong oleh faktor penyebab eksternal.

Kaitan antara kemampuan pelaku dan pertanggung-jawaban pidana ini lama pemidanaan bisa dijelaskan dengan teori atribusi. Teori ini mengatakan bahwa ketika individu melakukan tindakan karena faktor eksternal atau lingkungan akan dianggap pertanggung jawaban pidananya lebih ringan sehingga akan mendapat pidana yang lebih ringan. Sebaliknya jika individu melakukan kejahatan pemerkosaan karena faktor internal maka pertanggung jawaban pidananya akan lebih berat sehingga akan dinilai layak untuk dipidana berat (Costanzo, 2006).

Interaksi antara keseriusan kejahatan dan tanggung jawab pidana ini cukup menarik untuk dibahas dalam kasus pemerkosaan. Wahid dan Irfan (2001) mengatakan bahwa motif melaku pemerkosaan adalah kurangnya kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan seksual, obat-obatan terlarang lingkungan seperti perceraian keluarga dan rendahnya ekonomi serta pendidikan. Faktor-faktor ini dianggap logis jika ada pada orang dewasa, sebaliknya faktor

penyebab pemerkosaan ini dirasa janggal jika terdapat pada pelaku pemerkosaan yang masih berusia anak-anak. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak juga banyak terjadi (Unicef Indonesia, 2006). Penyebab pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal seperti pornografi, imitasi dan paksaan.

Dari uraian ini maka apakah keadilan retributif dengan memberikan pemidanaan yang seberat-beratnya bisa diterapkan untuk pelaku pemerkosaan baik untuk usia dewasa maupun pelaku yang masih berusia anak-anak, yang secara psikologis mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Beberapa referensi, misalnya Tyler (2006) dan Darley (2009) menunjukkan bahwa pemidanaan sebagai balas dendam tidak menunjukkan bahwa pemidanaan tidak memberikan banyak manfaat untuk pelaku dan masyarakat. Bahkan penilaian keadilan yang berdasar pada *sanction base model* ini mendapatkan kritikan sebagai model yang hanya berefek negatif pada pelaku dan tidak mempunyai upaya untuk melakukan pembenahan perilaku untuk pelaku kejahatan, terutama pemidanaan pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku

Dalam realitanya, jumlah pelaku kejahatan anak cukup besar sebagaimana dalam data sebanyak 4.325 anak ditahan di rumah tahanan dan penjara (Unicef Indonesia, 2006). Dalam kurun tahun 2002-2004, Litmas hanya merekomendasikan 8.097 anak untuk dijatuhi pidana, kenyataannya sebanyak 9.256 anak yang dijatuhi pidana. Sebaliknya, dari 1.294 rekomendasi untuk mengembalikan anak ke walinya, hanya 114 anak yang dikembalikan kepada wali atau orang tuanya. Tingginya angka pemidanaan anak tidak terkait dengan bentuk

pelanggaran hukum yang serius (Putri, 2001). Hal ini tentu mengusik rasa keadilan dan memunculkan pertanyaan apakah pemidanaan yang berat untuk anak-anak dinilai adil secara retributif, ataukah sebaliknya, pelaku dewasa yang layak dihukum berat?

Jika sesuai dengan paparan di atas bahwa usia pelaku mempengaruhi penilaian keadilan retributif pemidanaan pelaku pemerkosaan. Menunjukkan bahwa subjek tidak hanya melihat pemerkosaan sebagai kejahatan yang berat tetapi juga melihat kelayakan pelaku untuk diberi pidana yang berat atau bahkan dibebaskan. Dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan dibutuhkan kondisi yang tenang agar penilaian keadilan retributif yang dibuat bisa akurat. Dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa ada kecenderungan seseorang untuk melakukan penilaian secara *heuristic*. Penilaian ini memang meringankan secara kognitif terlebih lagi penilaian terkait dengan putusan hukum membuat penilai terjebak pada *anchoring*.

Bentuk keadilan yang lain yang mendapat sorotan untuk diterapkan adalah keadilan restoratif. Prinsip keadilan restoratif adalah sejauh mana putusan pidana berorientasi pada keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif ini lebih berafiliasi pada filosofi rehabilitasi (O'Hara, 2005). Dalam pendekatan keadilan restoratif, seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus diberi kesempatan untuk memperbaiki masa depannya, sehingga secara psikologis bisa hidup di masyarakat secara baik dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan kata lain, keadilan restoratif diharapkan pelaku menjadi anggota masyarakat yang lebih baik (Tyler, 2006). Keadilan restoratif juga mengacu pada efek pencegahan

untuk masyarakat. Diharapkan masyarakat belajar dari kasus yang terjadi dan menghindari melakukan kejahatan seperti dalam kasus tersebut (Ali, 2009).

Kejahatan yang berat mempengaruhi respon psikologis masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Penentuan berat ringan kejahatan terkait dengan kerusakan atau kerugian dari kejahatan yang dilakukan, selain itu residivisme atau pengulangan kejahatan juga mempengaruhi lama pemidanaan (Rossi, et. al., 1985). Kejahatan yang berat, tidak hanya meniscayakan keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif, mengingat prinsip keadilan restoratif adalah mengembalikan kondisi keadilan setelah terjadinya kejahatan.

Ada beberapa konsep tentang rehabilitasi dengan tindak pidana, salah satunya dikatakan oleh Ward et. al. (2006) bahwa pelaku kejahatan pemerkosaan adalah orang yang mempunyai gangguan pola pikir psikopat. Memerlukan penanganan yang lebih lama untuk disembuhkan. Meskipun demikian kejahatan tetap harus diatasi. Menurut filosofi pemidanaan, untuk mengurangi kejahatan, pelaku kejahatan harus diperbaiki perilakunya (Tyler 2006).

Untuk itu pemidanaan hendaknya juga harus berorientasi pada prediksi kemungkinan pelaku kejahatan bisa mengubah perilakunya selama menjalani masa hukuman. Dari hal ini maka menimbulkan pertanyaan bahwa apakah lama hukuman akan mempengaruhi penilaian keadilan restoratif

Umumnya dorongan penerapan keadilan restoratif muncul pada kasus tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Meskipun demikian, seperti yang dikemukakan oleh Tyler, (2006), bahwa keadilan restoratif juga bermanfaat

untuk melakukan regulasi sosial pada tindak kejahatan apapun. Maka sebenarnya keadilan restoratif juga harus diterapkan pada pelaku dewasa.

Dalam kajian psikologi, dibanding dengan keadilan retributif, keadilan restoratif belum banyak diteliti. Keadilan restoratif ini bisa sebagai konsep alternatif dari keadilan retributif yang sering dianggap menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di masyarakat (Okimoto, Michael & Feather, 2009).

Dalam pendekatan pemidanaan, keadilan restoratif berafiliasi pada pendekatan neo klasik, yang lebih melihat beberapa unsur pengecualian dalam pemberian lama pidana dan usia adalah salah satu yang dipertimbangkan dalam pemidanaan. Pengecualian ini diikuti dengan tujuan rehabilitasi. Kaitan antara penilaian lama pidana dan usia pelaku keadilan restoratif terdapat pada kesesuaian pidana yang diberikannya pada pelaku dengan perkiraan tentang masa rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pelaku. Secara teori perkembangan, pelaku yang masih berusia anak-anak lebih mudah untuk direhabilitasi perilakunya dibanding dengan perilaku yang sudah berusaha dewasa. Seperti yang dikatakan oleh Monk, et. al. (2002) bahwa masa perkembangan awal lebih mudah untuk berubah. Selain itu menilai penyebab tindak kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak lebih banyak dilakukan karena pengaruh luar. Anak-anak dianggap masih belum mempunyai kemampuan untuk mengontrol perilakunya. Selain juga anak-anak diharapkan mempunyai masa depan yang lebih panjang dan harus diselamatkan (Carson & Felthous, 2003; Rogers, 2004).

Pelaku pemerkosaan yang masih anak-anak secara perkembangan lebih mudah diubah dibanding dengan pelaku pemerkosaan dewasa, selain itu

pemeriksaan yang dilakukan oleh anak-anak juga tidak dipicu oleh faktor-faktor deviasi perilaku seksual, sehingga dari hal ini diprediksikan bahwa pelaku dewasa lebih berpotensi mengalami pengulangan dibanding pelaku anak-anak (Veneziano & Veneziano, 2002)

Dalam beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa usia pelaku merupakan faktor yang dalam mempengaruhi penilaian keadilan. Penelitian Steffensmeier, Ulmer & Kramer (1998); Bergemon & McKelvie (2004); Smith & Hed (1979) menunjukkan bahwa terdakwa yang berusia lebih muda dianggap lebih layak untuk menerima pidana yang ringan daripada yang terdakwa lebih tua. untuk menentukan apakah efek usia hanyalah hasil dari asumsi bahwa terdakwa lebih muda mungkin punya masa depan yang lebih cerah.

Penelitian kaitan keadilan restoratif dan usia belum menunjukkan hasil yang konsisten. Dalam hasil penelitiannya Rogers (2004) misalnya, bahwa usia pelaku mempengaruhi sikap pada pembedaan, tetapi tidak mempunyai pengaruh dalam sikap terhadap treatment atau rehabilitasi pelaku. Hasil ini bertolak belakang dengan keinginan sistem hukum untuk memberikan melindungi anak-anak yang berurusan secara hukum.

Inkonsistensi hasil penelitian tentang usia dan kaitannya pada sikap terhadap rehabilitasi memunculkan pertanyaan bahwa apakah masyarakat pada umumnya atau penegak hukum khususnya, akan mengedepankan kemarahan pada pelaku kejahatan berat dalam hal ini pemeriksaan dengan menghukum pelaku seberat-beratnya tanpa mengindahkan usia pelaku.

Penilaian keadilan prosedural pidana adalah penilaian keadilan terkait dengan sejauh mana kualitas proses pengadilan dan perlakuan yang ada di pengadilan (Tyler, 2006). Keadilan prosedural merupakan *process based model* yang berusaha menjelaskan penilaian terhadap pengadilan melalui pengukuran pada perasaan publik berkaitan dengan keadilan dalam prosedur yang ada di pengadilan (Tyler, 2001; Tyler & Huo, 2002). Seseorang yang mengedepankan penilaian keadilan prosedural, cenderung tidak memperdulikan hasil yang diputuskan atau efek dari hasil tersebut, tetapi lebih menitik beratkan proses yang tepat (Heuer, 2005)

Ada tiga kriteria yang digunakan individu untuk menilai keadilan prosedural menurut Lind & Tyler (1988) yaitu, *trustworthiness to authority*, *neutrality* dan *respect*. *Trustworthiness to authority* mengacu pada kepercayaan bahwa otoritas mempedulikan dan mempunyai keinginan yang baik. *Neutrality* berkaitan dengan nihilnya bias dalam pengambilan keputusan. *Respect* terkait dengan perlakuan yang sopan, bermartabat serta mengindahkan hak asasi seseorang. Dengan kata lain, pemberian pidana yang adil secara prosedural adalah jika putusan tersebut diambil oleh hakim yang terpercaya, sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan hak dari pelaku

Terkait dengan pembedaan pelaku pemerkosaan, putusan yang adil secara prosedural adalah putusan yang sesuai dengan aturan KUHP, dan KUHP, serta mempertimbangkan beberapa hal yang terkait, misalnya usai, barang bukti, tuntutan jaksa dan pertimbangan keberadaan pelaku. Maka jika putusan yang diambil sudah memenuhi unsur-unsur tersebut maka apapun hasilnya akan memuaskan semua pihak. Seperti yang dikatakan oleh Tyler (2006) seseorang yang lebih

mempertimbangkan penilaian keadilan prosedural tidak hanya menekankan pada hasil atau dalam hal ini adalah lama pidana, tetapi juga mengedepankan pada kesesuaian aturan dan proses sesuai dengan undang-undang perlindungan anak atau sesuai dengan proses peradilan anak maupun proses peradilan dewasa.

Pengadilan banding merupakan upaya untuk mencari keadilan. Putusan dari kasus yang diajukan dalam pengadilan banding adalah kasus yang dinilai oleh pihak yang bersengketa, baik terdakwa (pelaku) atau jaksa, sebagai yang diputuskan kurang adil. Memo banding umumnya mengungkap beberapa poin dari kelemahan putusan pengadilan negeri, misalnya penilaian lemahnya pasal, penilaian hakim tidak memperhatikan keterangan saksi atau bukti-bukti atau pertimbangan hakim yang dirasa kurang tepat.

Dari proses ini diharapkan pengadilan tinggi bisa memberikan pendapat alternatif terhadap prosedur yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Dengan kata lain apakah Hakim Pengadilan Negeri sudah melakukan pengambilan keputusan secara benar dan terpercaya (*trustworthiness*), netral sesuai dengan azas Undang-undang (*neutrality*) dan sudah memperhimbangkan kebaikan pihak-pihak yang bertikai (*respect*)

Proses penilaian keadilan prosedural ini banyak dilakukan pada proses peradilan tingkat banding di pengadilan tinggi atau kasasi di mahkamah agung. Akurasi penilaian ketepatan proses yang tertuang di dokumen sangat dibutuhkan karena di persidangan tersebut tidak menghadirkan saksi, saksi korban atau pelaku.

Disamping mengedepankan materi informasi, seperti lama pidana dan usia pelaku, suasana kerja juga mempengaruhi akurasi dari penilaian keadilan

prosedural ini. Akurasi penilaian ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti proses kognitif seperti *anchoring-heuristic* dan aspek lingkungan seperti tekanan waktu.

Uniknya dari penelusuran peneliti pada putusan hakim tinggi dalam kasus banding sebagian besar sama dengan putusan pengadilan tinggi (Lampiran), sehingga memunculkan pertanyaan apakah proses-proses ini mengalami bias dalam penilaian?

Penilaian keadilan retributif, restoratif dan prosedural memang dipengaruhi oleh bentuk kasus, selain itu ada faktor luar lain yang mempengaruhi penilaian keadilan ini. Seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan sidang banding, majelis hakim hanya mempunyai waktu yang “terbatas” untuk menilai dan memutuskan kasus yang disidangkan.

Idealnya dalam pengambilan keputusan tersedia waktu yang cukup guna mencapai putusan yang berkualitas (Johnson & Johnson, 1996). Dengan waktu yang cukup maka hakim atau individu pada umumnya, akan mampu mentelaah setiap informasi dengan baik. Sebaliknya tekanan waktu cenderung membuat anggota kelompok mempersempit perhatian, mendorong untuk lebih berpikir sederhana dan mengolah informasi secara heuristik (Brown & Miller 2000, dan Kelly & Karau 1999), memberikan efek stress, serta menurunkan kreativitas dalam berfikir (Kruglanski & Webster 1991), dan cenderung menurunkan fungsi kognitif pada individu (Janis 1993).

Dalam kondisi diprediksikan, tekanan waktu akan membuat Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri yang disajikan merupakan putusan yang mempunyai nilai keadilan yang tinggi. Hal ini disebabkan

tekanan waktu akan membuat seorang penilai cenderung menghemat upaya kognitifnya dan berfikir heuristik. Proses heuristik yang paling sering terjadi dalam penilaian keadilan sering terjadi. Salah satu yang paling sering terjadi adalah pengaruh dari *anchoring*. Penelitian efek *anchoring* yang disebut telah menunjukkan bahwa standar yang dipilih secara acak dalam tugas penilaian komparatif, secara dramatis dapat mempengaruhi penilaian mutlak berikutnya dari target yang sama. Banyak temuan menunjukkan bahwa standar yang tidak memiliki relevansi dapat mengarahkan penilaian numerik yang dihasilkan di dalam kondisi yang penuh ketidakpastian (Mussweiler & Strack, 1999).

Efek *anchoring* juga terjadi dalam dunia nyata yang terjadi di dalam domain kehidupan sosial, *anchoring* dapat terjadi pada pengambilan putusan dan penilaian yang dilakukan oleh lembaga sosial dengan konsekuensi untuk orang banyak. Misalnya, efek *anchoring* yang kuat telah ditunjukkan dalam konteks negosiasi (Galinsky & Mussweiler, 2001) serta dalam pembuatan keputusan pengadilan baik orang awam (Chapman & Bornstein, 1996) maupun ahli hukum (Englich & Mussweiler, 2001). Dalam konteks hukum, keputusan pidana dari ahli hukum dipengaruhi oleh *anchor* yang tidak relevan seperti pertanyaan wartawan, tuntutan pidana yang secara acak ditentukan oleh lemparan dadu (Englich, Mussweiler, & Strack, 2006), atau tuntutan pidana ekstrim yang disuarakan ke ruang sidang oleh sebagian orang (Englich, 2005 dalam Englich, Mussweiler, & Strack, 2006). Secara keseluruhan, bukti ini menunjukkan bahwa *anchoring* adalah fenomena kuat dalam dunia hukum. Seperti dalam penelitian Probowati (2005) bahwa hakim cenderung

mengambil keputusan berdasarkan pada tuntutan jaksa, dan lama pidana yang diberikan tidak terpaut jauh dengan tuntutan jaksa.

Di sisi lain Reid (2011) mengatakan bahwa tekanan waktu tidak mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan bagi seseorang yang sudah terlatih. Hal ini masih membutuhkan pengujian mengingat bahwa tekanan kerja dan kompleksitas pekerjaan berkorelasi negatif. Dengan kata lain kompleksitas kerja yang tinggi akan mengalami hambatan jika dalam situasi yang menekan, sebaliknya pekerjaan dengan kompleksitas yang rendah akan diperoleh hasil yang baik jika berada dalam kondisi yang menekan. Mengingat penilaian dan pengambilan keputusan dalam persidangan merupakan pekerjaan yang kompleks, maka untuk membuktikan bahwa apakah efek *anchoring* dalam penilaian keadilan prosedural benar-benar terjadi, sehingga dalam penelitian ini bisa tergambarkan interaksi pengaruh lama pidana, usia pelaku, dan tekanan waktu terhadap penilaian keadilan prosedural.

Selain faktor eksternal lama pidana dari Hakim Pengadilan Negeri dan usia pelaku serta sistem kerja dalam hal ini batasan waktu, faktor psikologis individu penilai keadilan dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pengolah informasi dan anggota dalam kelompok juga berpengaruh terhadap penilaian keadilan pembedaan pelaku pemerkosaan anak. Beberapa penelitian tentang sikap terhadap pemerkosaan (Golge, Yavuz, Miiderrisoglu, & Yavuz, 2003; Kennedy & Gorzalka, 2002), toleransi terhadap kasus pemerkosaan (Hall & Beizio, 1986), Persepsi terhadap pemerkosaan (White & Kurpius, 2002), dan mitos-mitos pemerkosaan atau *myth of rape* (Cowan, 2000; Gray, 2006). Pada individu yang mempercayai bahwa pemerkosaan adalah kesalahan pelaku dan beranggapan bahwa pemerkosaan

disebabkan oleh laki-laki seperti *Male dominance*, *male sexuality*, *male* dan *male pathology*, cenderung untuk menghukum pemerkosa lebih berat (Cowan, 2000).

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sikap, persepsi, toleransi dan mitos tentang pemerkosaan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain nilai peran gender (White & Kurpius, 2002; Golge, et. al., 2003). Penelitian tentang sikap terhadap pemerkosaan juga melibatkan Jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih toleran terhadap kejahatan pemerkosaan dibanding perempuan (Lee, Busch, Jinseok, & Lim, 2007), perempuan cenderung anti pada *myth of rape* (mitos pemerkosaan bahwa korban mempunyai kontribusi terhadap munculnya tindak pidana pemerkosaan) dibanding dengan laki-laki, dan anti pada *myth of rape* cenderung akan menghukum pelaku pemerkosaan lebih berat (Gray, 2006).

Sexism merupakan sikap terhadap jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan. *Sexism* merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi sikap terhadap kejahatan pemerkosaan (misal: implikasi dari penilaian), sikap dan persepsi terhadap pemerkosaan adalah keinginan untuk bereaksi terhadap kejahatan pemerkosaan tersebut, baik pada pelaku maupun pada korban.

Sexism, juga mempengaruhi sikap dan penilaian terhadap pelaku dan korban tindak kejahatan pemerkosaan (Hall & Beizio, 1986; Chapleau, Oswald, & Russell, 2007; Yamawaki, Darby & Queros, 2007), misalnya penelitian yang dilakukan Yamawaki, Darby, Queiroz (2007) yang menunjukkan bahwa individu yang mempunyai nilai *hostile power* yang tinggi cenderung menilai bahwa pelaku pemerkosaan tidak harus dituntut dengan pidana tinggi, karena dianggap kurang mempunyai kontribusi dalam kesalahan. Pada studi yang lain menemukan bahwa

individu yang mempunyai *Benevolent sexism* cenderung lebih menuntut pidana lebih berat (Dardenne, Dumont, & Bollier, 2007). Pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa perempuan cenderung menuntut pidana lebih berat. Penelitian lain menunjukkan bahwa ada pengaruh antara *sexism* terhadap penilaian terhadap pelaku dan korban pemerkosaan (Viki & Abrams, 2002; Aosved & Long, 2006; Sakalli-Uğurlu, Yalçın & Glick, 2007)

Uraian di atas, menurut peneliti menarik untuk diteliti apakah Lama pidana, usia pelaku, dan tekanan waktu mempengaruhi penilaian keadilan pembedaan pemerkosaan terhadap anak? dan apakah *sexism*, baik *benevolent sexism* maupun *hostile sexism* merupakan co-varian yang mempengaruhi peran, lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu dalam penilaian keadilan pembedaan pemerkosaan terhadap anak?

Melihat pentingnya pemahaman tentang penilaian keadilan pada kasus kejahatan pemerkosaan maka penelitian ini mengambil judul “PERAN LAMA PIDANA, USIA PELAKU, DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP PENILAIAN KEADILAN PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN ANAK”.

B. Rumusan Masalah.

Permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu terhadap penilaian keadilan retributif untuk pelaku pemerkosaan anak?
2. Bagaimana pengaruh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu terhadap penilaian keadilan restoratif untuk pelaku pemerkosaan anak?

3. Bagaimana pengaruh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu terhadap penilaian keadilan prosedural untuk pelaku pemerkosaan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu dalam mempengaruhi penilaian keadilan retributif, restoratif dan prosedural pada pemidanaan pelaku pemerkosaan anak.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan psikologi dan secara praktis bermanfaat menjelaskan penilaian keadilan pemidanaan. Pemahaman penilaian keadilan pemidanaan akan memberikan pemahaman terhadap pentingnya aspek *extra legal* khususnya aspek psiko-sosial yang menentukan pemenuhan rasa keadilan pada kasus-kasus pidana terutama untuk kasus kejahatan pemerkosaan yang terjadi pada aparat hukum. Penelitian ini juga bisa ditujukan pada masyarakat awam. Dengan pemahaman penilaian keadilan akan memberikan arah reaksi yang benar dalam merespon kasus-kasus kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan teoritik pada penilaian gambaran lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan dalam bidang hukum. Diharapkan juga penelitian ini memberikan khasanah keilmuan dalam bidang psikologi hukum Indonesia.

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan

pemidanaan untuk pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam penegakan hukum terutama pada aspek sosial psikologis masyarakat Indonesia yang terkait dengan pemenuhan keadilan masyarakat dalam aspek hukum.

E. Keaslian Penelitian.

Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian tentang psikologi hukum pidana telah cukup lama dilakukan di luar negeri misalnya Stalans & Lurigio, (1990) yang membedakan sikap pidana antara profesional dan orang awam, sedangkan Feather (1996; 1980) yang terkenal dengan model *Deservingness* nya melakukan penelitian tentang penilaian keadilan atau kelayakan pidana dalam berbagai setting dengan kebanyakan melibatkan mahasiswa (Feather, 1996; 1998).

Penelitian tentang efek *anchoring* juga diteliti oleh Englich, Mussweiler, & Strack, (2005) yang meneliti pada jaksa dan hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Putri (2010) meneliti tentang keputusan hakim dalam perkara anak yang melanggar hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) menekankan *integrated complexity* dalam pengambilan keputusan hakim pada perkara anak, dengan menggunakan data-data wawancara, arsip yang kemudian dikuantitatifkan.

Salah satu yang dikenal adalah penelitian tentang tuntutan jaksa dan kepribadian otoritarian hakim dalam proses pemidanaan di Indonesia (Probowati, 2001), dengan setting pengambilan kasus pembunuhan di pengadilan negeri.

Adapun pada penelitian kali ini lebih menekankan pada reaksi atau respon penilaian keadilan pada seting Hakim Pengadilan Tinggi atas produk Pengadilan Negeri. Penelitian ini mencoba melibatkan aspek-aspek yang ada penilaian pengadilan tinggi mulai aspek informasi tentang lama pidana penjara untuk pelaku pemerkosaan, usia pelaku pemerkosaan, tekanan waktu dan *sexism* untuk dilihat pengaruhnya terhadap penilaian keadilan pemidanaan untuk pelaku pemerkosaan anak.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari rangkaian hasil eksperimen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian keadilan retributif pidana untuk pelaku pemerkosaan anak dipengaruhi oleh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu.
2. Penilaian keadilan restoratif pidana untuk pelaku pemerkosaan anak dipengaruhi oleh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu.
3. Lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural pidana pelaku pemerkosaan.

Pada penelitian ini juga ditemukan simpulan tambahan sebagai berikut:

1. Subjek cenderung menganggap bahwa kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan layak untuk dihukum berat. Hal ini terbukti dari hasil eksperimen pertama pada penilaian keadilan retributif, bahwa pidana 15 tahun untuk pelaku pemerkosaan dianggap lebih adil dibanding dengan pidana 5 tahun dan vonis bebas.
2. Subjek juga mempertimbangkan latar belakang pelaku pemerkosaan, terutama usia pelaku. Subjek cenderung menganggap bahwa memberikan pidana yang lebih berat untuk pelaku yang sudah dewasa dan cenderung memberikan vonis yang ringan pada pelaku yang masih anak-anak, baik untuk penilaian keadilan restoratif maupun penilaian keadilan retributif.

3. Dalam melakukan penilaian yang baik dan membuat sebuah putusan, Subjek butuh waktu yang lebih longgar untuk melakukan penilaian dan keputusan yang berkualitas, karena waktu yang sempit cenderung membuat subjek kurang leluasa mengakses informasi dengan baik.
4. Subjek menilai bahwa makin lama pidana makin dinilai mempunyai kemanfaatan untuk pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pidana 15 tahun dinilai lebih adil secara restoratif dibanding dengan dengan pidana 5 tahun dan vonis bebas, sedangkan pidana 5 tahun dianggap lebih adil dibanding vonis bebas.
5. Penilaian keadilan restoratif subjek dipengaruhi oleh perbedaan usia pelaku hal ini tergambar bahwa pidana 5 tahun dan vonis bebas dinilai lebih memenuhi keadilan restoratif jika diberikan pada pelaku pemerkosaan anak-anak dibanding dengan jika diberikan ada pelaku dewasa. Sebaliknya pidana maksimal atau 15 tahun lebih adil secara restoratif jika diberikan kepada pelaku dewasa.
6. Subjek cenderung mempercayai bahwa proses telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Hal ini tergambar pada penilaian keadilan prosedural yang cenderung tinggi pada setiap eksperimen.
7. Subjek cenderung lebih “gampang” untuk menuntut pidana atau hukuman pelaku dengan pidana yang lebih lama. Hal ini dilihat dari konsistensi dominasi pengaruh lama pidana terhadap penilaian keadilan retributif, dibanding dengan peran usia pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa intuisi moral subjek

cenderung membawa subjek terjebak dalam *heuristic thinking* pada kasus yang dilihatnya.

8. Meskipun dengan tujuan kemanfaatan bagi korban, tetapi ada kecenderungan subjek untuk menilai bahwa pidana yang lebih lama merupakan pidana yang bermanfaat. Hal ini terlihat rerata penilaian keadilan restoratif antar lama pidana 15 tahun, 5 tahun dan vonis bebas, baik pada pelaku dewasa maupun pada pelaku anak-anak.
9. Subjek cenderung menganggap putusan apapun yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri merupakan putusan yang sudah melalui prosedur yang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya perbedaan penilaian keadilan prosedural antara pidana 15 tahun, 5 tahun dan vonis bebas.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, pertama subjek penelitian meskipun mereka mempelajari hukum namun mereka belum bisa disejajarkan dengan hakim yang sesungguhnya karena untuk menilai sebuah putusan hakim Pengadilan Negeri dibutuhkan pengalaman yang cukup. Kesulitan mengundang hakim apalagi hakim pengadilan tinggi dalam jumlah yang memadai merupakan kesulitan tersendiri.

Kedua, durasi tekanan waktu 10 menit masih perlu pengujian lagi untuk memastikan sebagai waktu yang memberikan dampak stress bagi subjek. Hal ini terindikasi bahwa waktu hanya bisa membedakan pidana 15 tahun untuk pelaku anak dan pelaku dewasa, sedangkan pada kelompok perlakuan yang lain tidak

menunjukkan perbedaan. Kelemahan lain adalah pengukuran tentang penilaian keadilan prosedural belum mempunyai kehandalan yang tinggi. Tekanan waktu merupakan implementasi dari beban kerja dan tekanan lingkungan pada saat melakukan penilaian, sehingga waktu 10 menit dianggap masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Ketiga, meskipun ada upaya untuk meminimalisir variabel pengganggu dalam eksperimen ini, dengan memberikan perbedaan instruksi dan format skenario yang mudah difahami, namun tidak adanya *manipulation check* merupakan kelemahan lain dalam penelitian ini.

C. Saran.

Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan beberapa hal sebagaimana berikut ini:

1. Dari hasil secara konsisten menunjukkan bahwa makin lama pidana makin dianggap adil, maka untuk mencapai rasa keadilan harus mempertimbangkan penilaian tentang keseriusan kejahatan. Hal ini terkait bahwa kejahatan yang berat cenderung dianggap harus diberikan hukuman yang berat. Adapun dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerkosaan merupakan kejahatan yang dianggap berat dan layak dihukum seberat-beratnya
2. Untuk Penegak Hukum. Pelaku kejahatan anak-anak lebih membutuhkan restorasi (perlakuan rehabilitasi) dibanding hukuman, untuk itu bagi penegak hukum perlu memperlakukan anak-anak secara khusus dan vonis yang lebih ringan dibanding dengan pelaku dewasa, demi tercapainya rasa keadilan masyarakat.

3. Pimpinan Institusi hukum: Perlu mengkaji ulang beban kerja yang diberikan pada aparat hukum baik hakim, jaksa maupun polisi. Keterbatasan tenaga dan waktu yang dipunyai oleh penegak hukum akan cenderung mengkaburkan tujuan proses hukum sebagai proses pencapaian keadilan. Saran ini berdasarkan bahwa tekanan waktu membuat individu cenderung kurang berfikir secara kritis dalam menilai sebuah kasus, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks
4. Untuk peneliti yang sama:
 - a. Ketiga manipulasi pada eksperimen kali ini merupakan aspek eksternal dari subjek, sehingga untuk menyempurnakan hasil penelitian dan memberi gambaran pola pikir individu dalam menilai kasus kejahatan. Untuk itu perlu menggali lebih dalam tentang aspek internal, seperti nilai, dan kepribadian.
 - b. Untuk peneliti yang sama: Disarankan untuk melibatkan bentuk kejahatan yang lain, selain pemerkosaan, dengan metode *within subject*. Diharapkan akan lebih meyakinkan bahwa keseriusan kejahatan memberikan efek pada keinginan untuk menghukum. Selain itu pada realita pelaksanaan di pengadilan seorang penegak hukum umumnya tidak menangani satu bentuk kejahatan semata.
 - c. Untuk peneliti yang sama: Terkait dengan tekanan waktu disarankan ada penelitian tentang efek waktu dan dengan kasus yang sesungguhnya untuk mendapatkan berapa lama untuk kasus yang sesungguhnya. Tekanan waktu sesungguhnya merupakan perwujudan dari beban kerja seorang

hakim. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk membuat penelitian tentang perbedaan penilaian keadilan pembedaan antara hakim yang mempunyai beban kerja tinggi dan hakim yang mempunyai kerja rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, D., Viki, G. T., Masser, B., & Bohner, G. (2003). Perceptions of stranger and acquaintance rape: The role of benevolent and hostile sexism in victim blame and rape proclivity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84, 111–125.
- Adelman L., Miller S.L, Henderson D, Schoelles M. (2003). Using Brunswikian theory and a longitudinal design to study how hierarchical teams adapt to increasing levels of time pressure. *Acta Psychology*. 112(2):181–206
- Ahrens, C. E., & Campbell, R. (2000). Assisting rape victims as they recover from rape: The impact on friends. *Journal of Interpersonal Violence*, 15, 959-986.
- Alexander, J. G., de Chesnay, M., Marshall, E., Campbel, R, A., Johnson, S., et. al. (1989). Parallel reactions in rape victims and rape researchers. *Violence and Victim*, 4, 58-62.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Altemeyer, B. (1981). *Rigth-Wing Authoritarianism*. Winnipeg: University of Manitoba.
- Altemeyer, B., & Bruce, H. (1992). Authoritarianism, religious, fundamentalism, quest and prejudice. *The International Journal for The Psychology of Religion*, 2, 113-133.
- Anwar, Y & Adang (2009) Sistem Peradilan Pidana; Konsep Komponen dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia; Bandung Widya Padjajaran.
- Aosved, A. C., & Long, P. J. (2006). Co-occurrence of Rape Myth Acceptance, Sexism, Racism, Homophobia, Ageism, Classism, and Religious Intolerance. *Sex Role*, 55, 481–492.
- Applegate, B. K., Cullen, F. T., & Fisher, B. S. (2002). Public views toward crime and correctional policies: Is there a gender gap? . *Journal of Criminal Justice*, 30, 89-100.
- Applegate, B. K., Cullen, F. T., Fisher, B. S., & Vander Ven, T. (2000). Forgiveness and fundamentalism: Reconsidering the relationship between correctional attitudes religion. *Criminology*, 38, 719-753.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashkar, P. J., & Kenny, D. T. (2007). Moral Reasoning of Adolescent Male Offenders: Comparison of Sexual and Non Sexual Offenders . *Criminal Justice and Behavior*, 34; 108-118.

- Atmasasmita, R. (1983). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Barbare, H & Seto, M.C. (1997). Pedophilia: Assessment and Treatment. In D. R. Laws & W.T.O'Donohue (Ed.). *Sexual deviance: theory, assessment and treatment*. New York: Guilford Press.
- Baron, D., & Byrne, J. (2005). *Psikologi Sosial (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Barreto, M., & Ellemers, N. (2005). The burden of *benevolentsexism*: How it contributes to the maintenance of gender inequalities. . *European Journal of Social Psychology*, 35, 633-642.
- Baxter, D.J, Marshall, W.L., Barbaree, H.E., Davidson, P.P., & Malcolm, P.B (1984) Deviant sexual behavior: Differentiating sex offenders by criminal and personal history, psychometric measures, and sexual response *Criminal Justice and Behavior* 11: 477-501.
- Blank, H., Musch, J., & Pohl, R. (2007). Hindsight Bias: On Being Wise After The Event. *Social Cognition* , 25, 1-9. .
- Bornstein, B. H., Rung, L., & Miller, M. K. (2002). The effect of defendant remorse of mock juror decision in mal practice case. *Behavioral Sciences and the Law*, 393-409.
- Brockner, J., & Wiesenfeld, B. M. (1996). An integrative framework for explaining reactions to decisions: Interactive effects of outcomes and procedures. *Psychological Bulletin*, 120, 189-208.
- Brown, T. A. (2006). *Confirmatory Factor Analysis for Applied Research*. New York. New York: The Guilford Press.
- Brown, T. M. & Miller, C, E. (2000) Communication network in task performing group: Effect of task complexity, time pressure and interpersonal dominance. *Small Group Research*. 31. 131-157
- Burt, M.R. (1980). Cultural Myths and supports for rape. *Journal of Personality and Social Psychology*. 38: 217-230
- Carlsmith, K. M., & Darley, J. M (2008). Psychological Aspects of Retributive Justice. *Advances in Experimental Social Psychology*. 40, 193-236
- Caroll, J., Perkowitz, W., Lurigio, A. J., & Weaver, F. (1987). Sentencing goals, causal attributions, ideologi and personality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52, 107-118.

- Carson, D., & Felthous, A. (2003). Introduction to this issue: Mens rea. *Behavioral Sciences and the Law*, 21, 559–62.
- Chapman, G. B., & Bornstein, B. (1996). The more you ask for, the more you get: Anchoring in personal injury verdicts. *Applied Cognitive Psychology*, 10, 519–540.
- Chapman, G. B., & Johnson, E. J. (2002). Incorporating the irrelevant: Anchors in judgments of belief and value. In T. Gilovich, D. W. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), *The psychology of judgment: Heuristics and biases*. New York: Cambridge University Press.
- Chebat, J. C., & Slusarczyk, W. (2005). How emotions mediate the effects of perceived justice on loyalty in service recovery situations: an empirical study. *Journal of Business Research*, 664–673.
- Church, W. T., Wakeman, E. E., Miller, S., Clements, C. B., & Sun, F. (2008). The Community Attitudes Toward Sex Offenders Scale: The Development of a Psychometric Assessment Instrument. *Research on Social Work Practice*, 18, 251-259.
- Colquitt, J. A. et. al. (2001) Justice at the millennium: A meta-analysis review of 5 year of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology*. 86; 425-445
- Constanzo, M. (2006). *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum (terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cooke, D. J., Baldwin, P. J., & Howison, J. (2008). *Menyingkap Dunia Gelap Penjara (Terjemahan)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Cowan, G. (2000). Belief about the causes of four types of rape. *Sex Role*, 42. 807-823.
- Cremer, D., & Van den Boos, K. (2007). Justice and feelings: Toward a new era in justice reseach. *Social Justice Research*, 1-9.
- Cullen, F. T., Clark, G. A., Cullen, J. B., & Mathers, R. A. (1985). Attribution, salience and attitudes toward criminal sanctioning. *Criminal Justice and Behavior*, 12, 305-331.
- Dardenne, B., Dumont, M., & Bollier, T. (2007). Insidious dangers of benevolent sexism: Consequences for women's performance. *Interpersonal And Relationship And Group Processes*, 93,764-779.

- Darley, J. M. (2005). On the unlikely prospect of reducing crime rates by increasing the severity of prison sentences. *Journal of Law And Policy*, 13, 189-208.
- Darley, J. M. (2009). Morality in the Law: The Psychological Foundations of Citizens' Desires to Punish Transgressions. *Annual Review of Law and Social Science.*, 5:1–23.
- Darley, J. M., & Pittman, T. S. (2003). The psychology of compensatory and retributive justice. *Personality and Social Psychology Review*, 7, 324-336.
- Davies, M. (2002) male sexual assault victims: A selective review of the literature and implications for support services. *Aggression and Violent Behavior: A Review Journal*. 7 203-214.
- De Grada, E., Kruglanski, A. W., Mannetti, L., & Pierro, A. (1999). Motivated cognition and group interaction: Need for closure affects the contents and processes of collective negotiations. *Journal of Experimental Social Psychology*, 35, 346-365.
- Dennison, S. (2007). Criminal responsibility. In D. Carson, B. Milne, F. Pakes, & K. Shalev, *Applying Psychology to Criminal Justice* (pp. 131-165). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimitrov, D. M. (2010). Testing for Factorial Invariance in the Context of Construct Validation. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 43, 121-149.
- Dror, I. E., Busemeyer, J. R., & Basola, B. (1999). Decision making under time pressure: An independent test of sequential sampling models. *Memory & Cognition*, 27, 713-725.
- Englich, B., & Mussweiler, T. (2001). Sentencing under uncertainty: Anchoring effects in the courtroom. *Journal of Applied Social Psychology*, 31, 1535–1551.
- Englich, B., Mussweiler, T., & Strack, F. (2005). The last word in court — A hidden disadvantage for the defense. *Law and Human Behavior*, 29, 705–722.
- Englich, B., Mussweiler, T., & Strack, F. (2006). Playing dice with criminal sentences: The influence of irrelevant anchors on experts' judicial decision making. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32, 188–200.
- Entin, E.E, Serfaty D. (1999). Adaptive team coordination. *Human Factors* 41, 312–25

- Evans, S. S., & Scott, J. (1984). The *seriousness of crime* cross-culturally. *Criminology*, 22: 39–59.
- Eyre, M & Alison, L. (2007). To decide or not to decide: Decision Making and Decision Avoidance in critical incidents. In D. Carson, B. Milne, F. Pakes, & K. Shalev, *Applying Psychology to Criminal Justice* (pp. 211-232). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Farnworth, M., Longmire, D. R., & West, V. M. (1998). College students' views on criminal justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 9, 39-57.
- Faturochman. (2002). *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar.
- Feather, N. T. (1996). Reaction to penalties for an offense in relation to authoritarianism, values, perceived responsibility, perceived seriousness and deserviness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 571-587.
- Feather, N. T. (1998). Reaction to Penalties for offenses committed by police and public citizen: testing a social-cognitive process model of retributive Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 528-544.
- Feather, N. (1999). Judgments of *deservingness* : Studies in the psychology of justice and achievement. . *Personality and Sosial Psychology Review*, 3, 86-107.
- Feather, N. T., McKee, I. R., & Bekker, N. (2011). *Deservingness* and emotions: Testing a structural model that relates discrete emotions to the perceived *deservingness* of positive or negative outcomes. *Motivation and Emotion*, 35:1–13.
- Fedoroff, J. P., & Moran, B. (1997). Myths and misconceptions about sex offenders. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 6, 263–276.
- Finkerstein, C. (2002). Death and Retribution. *Criminal Justice Ethics*,, 12-22.
- Finucane, M. L., Al Hakami, A Slovi, P., Johnson, S. M (2000). The affect heuristic in judgments of risks and benefits. *Journal of Behavioral Decision Making*. 13: 1-17
- Foa, E. B & Rothbaum, B. O. (1998). *Treating the Trauma of Rape: Cognitive Behavior Therapy for PTSD*. New York: Guilford Press

- Galinsky, A. D. & Mussweiler, T (2001) First offer as anchor: The role of perspective taking and negotiator focus. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81: 657-669
- Gilbert, D., & Ebert, J. (2002). Decisions and revisions: The affective forecasting of changeable outcomes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82, 503-514.
- Glick, P., & Fiske, S. T (1996). The *Ambivalent sexism* inventory; Differentiating *hostile* and *benevolent* sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 491-512.
- Glick, P., & Fiske, S. T. (1997). *Hostile* and *benevolent* sexism: Measuring *Ambivalent sexism* attitudes toward women. *Psychology of Women Quarterly*, 21, 119-135.
- Glick, P & Fiske, S. T (1999). The *Ambivalent* toward men inventory: Differentiating *hostile* and *benevolent* belief about men. *Psychology of Women Quarterly*, 23. 519-536
- Glick, P., Fiske, S., Mladinic, A., Saiz, J., Abrams, D., Masser, B., et. al. (2000). Beyond prejudice as simple antipathy: *Hostile* and *benevolent* sexism across cultures. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79, 763-775.
- Glick, P., Lameiras, M., Fiske, S. T., Eckes, T., Masser, B., Volpato, C., et. al.. (2004). *Ambivalent* attitude toward men predict gender inequality in 16 nations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35, 713-728.
- Goldstein, D., & Gigerenzer, G. (2002). Models of ecological rationality: The recognition heuristic. *Psychological Review*, 109, 75-90.
- Golge, Z. B., Yavuz, M. F., Miiderrisoglu, S., & Yavuz, M. S. (2003). Turkish University Students' Attitudes Toward Rape. *Sex Role*, 49, 653-661.
- Gordon, R. A & Anderson, K. S (1995) Perceptions of race-stereotype and race-nonstereotypic crimes: The impact of response-time instructions on attribution and judgment. *Basic and Applied Social Psychology*, 16, 544-470
- Gromet, D. M. & Darley, J. M, (2009). Punishment and beyond: Achieving justice through the satisfaction multiple goal. *Law and Society Review*. 43. 1-39
- Gray, J. M. (2006). Rape myth belief and prejudice: effect on guilt in case of date rape. *Legal and Criminological Psychology*, 11, 75-80.

- Griffin, M. P., & West, D. A. (2006). The lowest of the low? Addressing the disparity between community view, public policy, and treatment effectiveness for sex offenders. *Law & Psychology Review*, 30, 143–169.
- Grubb, A. R., & Harrower, J. (2009). Understanding attribution of blame in cases of rape: An analysis of participant gender, type of rape and perceived similarity to the victim. *Journal of Sexual Aggression*, 15, 63–81.
- Guthrie, C., Rachilksi, J. J., & Wistrich, A. J. (2004). Inside the judicial mind. *Cornell Law Review*, 86, 777–830.
- Hall, E., & Beizio, S. (1986). Tolerance of Rape: A Sexism or Antisocial Attitude? *Psychology of Women Quarterly*, 10, 101–118.
- Hamilton, V. L & Hagiwara, S (1992) Role, responsibility, and account accross culture. *International Journal of Psychology*. 27. 157–179
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.
- Haney, C., & Zimbardo, P. (1998). The past and future of U.S. prison policy: Twenty-five years after the Stanford Prison Experiment. *American Psychologist*, 53, 709–727.
- Halgin, R. & Withbourne, S. K. (2010). *Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis dan Gangguan Psikologis* (Terjemahan). Jakarta: Salemba Humanika
- Harley, E. M. (2007). Hindsight bias in legal decision making. *Social Cognition*, 25, 48–63.
- Hasanuddin, Y. H., Arifin, J., Syaifuddin, A., & Azharuddin, A. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Hebl, M. R., King, E. B., Glick, P., Singletary, S. L., & Kazama, S. (2007). *Hostile and benevolent* reactions toward pregnant women: Complementary interpersonal punishments and rewards that maintain traditional roles. *Journal of Applied Psychology*, 92, 1499–1511.
- Heider, F. 1958. *The psychology of interpersonal relations*. New York: John Wiley & Sons
- Heuer, L. (2005). What's Just About the Criminal Justice System?: A Psychological Perspective. *Journal of Law and Policy*, 13, 209–228.
- Hilbig, B E. & Pohl, R F. (2009). Ignorance versus evidence-based decision making: A decision time analysis of the recognition heuristic. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 35, 1296–1305.

- Higgins, T. E, (2000). Social cognition: Learning about what matter in the social world, *European Journal of Social Psychology*. 30. 3-39
- Hogan, R., & Elmer, N. P (1981). Retributive Justice. In M. J. Lerner, & S. L. Lerner, *The Justice Motive in Social Behavior* (pp. 125-143). New York: Plenum Press.
- Hurwitz, J., & Smithey, S. (1998). Gender differences on crime and punishment. . *Political Research Quarterly*, 51, 89-115.
- Hutapea, R. (1995). *AIDS, PMS dan Pemerkosaan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Janis, I. L. (1993). Decision making under stres. In L Golberger & S. Breznitz (eds), *Handbook od stres: Theoretical and Clinical Aspects* (56-74). New York: Free Press.
- Jawa Pos. (2009, 12 27). KY Kaji putusan bermasalah; Mayoritas dari 1.400 vonis Hakim tidak penuhi rasa keadilan. p. 16.
- Johnson, D & Johnson, F, (1996). *Joining Together: Group Theory and Group Skills*. New York; Printice Hall
- Karen, T. (2003). Sex Offenders. *Criminology & Public Policy*, 3, 57-58.
- Karstedt, S. (2001). Emotions and criminal justice. *Theoretical Criminology*, 6, 299-214.
- Kelly, J. R., & Karau, S. J. (1999). Group Decision Making: The Effects of Initial Preferences and Time Pressure. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 25, 1342-1354.
- Kennedy, M. A., & Gorzalka, B. B. (2002). Asian and Non-Asian Attitudes Toward Rape, Sexual Harassment, and Sexuality. *Sex Role*, 46, 227-238.
- Kerr, N. L., & Hymes, R. W. (1995). Defendant-Juror Similarity and Mock Juror Judgments. *Law and Human Behavior*, , 19, 545-567.
- Killianski, S. E., & Rudman, L. A. (1998). Wanting it both ways: Do women approve of benovelent sexism. *Sex Role*, 39, 333-351.
- King, M., & Piper, C. (1995). *How the Law Thinks About Children*. Arena, Aldershot.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development*. San Francisco: Harper and Row.
- Koss, M. P. (1992). The underdetection of rape: Methodological choices influence incidence estimates. . *Journal of Social lissues*, 48, 61-75.

- Koss, M. P., Gidycz, C. A., & Wisniewski, N. (1987). The scope of rape: Incidence and prevalence of sexual aggression and victimization in a national sample of higher education students. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55, 162-170.
- Kramer, J.H., & Ulmer, J.T. (1996). Sentencing disparity and departures from guidelines. *Justice Quarterly*, 13, 401-425
- Kramer, J.H., & Ulmer, J.T. (2002). Downward departures for serious violent offenders: Local court "corrections" to Pennsylvania's sentencing guidelines. *Criminology*, 40, 897-932.
- Kruglanski, A. W & Webster, D. M. (1991) Group members reaction to opinion and deviates and conformist at varying degree of proximity to decision deadline and environmental noise. *Journal of Personality and Social Psychology*. 61. 212-225
- Kruglanski, A. W., & Webster, D. M. (1996). Motivated closing of the mind: "Seizing" and "Freezing". *Psychological Review*, 103, 263-283.
- Kurosawa, K. (1992). Responsibility and justice: A view cross cultures. *International Journal of Psychology*, 234-256.
- Lamintang, P.A.F dan Jisman, (1985). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru
- Landsman, S., & Rakos, R. (1994). A Preliminary inquiry into the effect of personally biasing information on judges and jurors in civil litigation. *Behavioral Sciences and the Law*, 12, 113-126.
- Langworthy, R. H., & Whitehead, J. T. (1986). Liberalism and fear as explanations of punitiveness. *Criminology*, 24, 575-591.
- Lee, J., Busch, N. B., Jinseok, & Lim, H. (2007). Attitudes Toward Date Rape Among University Students in South Korea. *Sex Role*, 57:641-649.
- Leiber, M. J., & Woodrick, A. C. (1997). Religious beliefs, attributional styles, and adherence to correctional orientations. *Criminal Justice and Behavior*, 24, 495-511.
- Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. New York: Plenum Press.
- Loeffler, R., & Lawson, T. J. (2002). Age and occupational status of defendant in relation to mock juror sentencing recommendation. *Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social*, 21: 289-292.

- Mackey, D. A., & Courtright, K. E. (2000). Assessing punitiveness among college students: A comparison of criminal justice majors with other majors. . *The Justice Profesional*, 12, 423-441.
- Mahendra, Y. I. (2007, Desember 5). *Hukum Islam dan Negara*. Retrieved Februari 2008,, from <http://www.scribd.com/word/download/2262639?extension=pdf>
- Malle, B., & Nelson, S. (2003). Judging mens rea: The tension between folk concepts and legal concepts of intentionality. *Behavioral Sciences & the Law*, 21, 563–80.
- Marti, M. W & Wissler, R.L 2000. Becarefull what you ask for; The effect on anchoring on personal damages aware. *Journal of Experiment Psychology*. 6. 91-103
- Masser, B. M., & Abrams, D. (2004). Reinforcing the glass ceiling: The consequences of *hostile sexism* for the female managerial candidates. *Sex Roles*, 51, 609-616.
- Masser, B., Viki, G. V., & Power, C. (2006). *Hostile sexism* and rape proclivity amongst men . *Sex Role*, 54, 565–574.
- Mazzella, R., & Feingold, A. (1994). The effects of physical attractiveness, race, socioeconomic status, and gender of defendants and victims on judgments of mock jurors. *Journal of Applied Social Psychology*, 24, 1315–1344.
- McKelvie, S. (2000). Quantifying the availability heuristic with famous names. *North American Journal of Psychology*, 2, 347-357.
- Melvin, Graming, & Garner. (1985). A Scale to Measure Attitudes toward Prisoners. *Criminal Justice & Behavior* , 12, 241-253.
- Miller, D. T., & Vidmar, N. (1981). The Social Psychology of Punishment Reactions. In M. J. Lerner, & S. L. Lerner, *The Justice Motive in Social Behavior* (pp. 145-172). New York: Plenum Press.
- Miller, M. K., Singer, J. A., & Jehle, A. (2008). Identification of circumtances under which religion effect each stage of trial process. *Applied Psychology in Criminal Justice*, 4, 135-171.
- Mitchell, T. L., Haw, R. M., Pfeifer, J. E., & Meissner, C. A. (2005)Racial bias in mock juror decision-making: A meta-analytic review of defendant Treatment *Law and Human Behavior*, 29 621-637

- Modecki, L. K. (2008). Addressing Gaps in the Maturity of Judgment Literature: Age Differences and Delinquency. *Law and Human Behavior*, 32:78–91.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1996). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Monk, P.J., Knoers, A.M.P & Haditomo. R., S. (2002) *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada Pres
- Mueller-Johnson, K., & Dhami, M. K. (2010). Effects of Offenders' Age and Health on Sentencing Decisions. *The Journal of Social Psychology*, 150, 77–97.
- Mulyadi, M. (2006), *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: USU Repository
- Mussweiler, T., & Strack, F. (1999). Hypothesis consistent testing and semantic priming in the anchoring paradigm: A selective accessibility model. *Journal of Experimental Social Psychology*, 35, 136–164.
- Mussweiler, T., Englich, B., & Strack, F. (2004). Anchoring effect. In R. Pohl (Ed.), *Cognitive illusions—A handbook on fallacies and biases in thinking, judgment, and memory* (pp. 183-200). London: Psychology Press.
- Nadler, J. & Rose, M.R. (2002). Victim impact testimony and the psychology of punishment. *Cornell Law Review*. 88 419-456
- Nagin, D. S. (1998). Criminal deterrence research at the outset of the twenty-first century. In M. Tonry (Ed.), *Crime and justice* (Vol. 23, pp. 1–42). Chicago: University of Chicago Press.
- Noll, D., & Harvey, L. (2008). Restorative Mediation: The Application of Restorative Justice Practice and Philosophy to Clergy Sexual Abuse Cases. *Journal of Child Sexual Abuse*, 17, 377-396.
- O'Connell, M. & Whelan, A (1996). Taking wrongs seriously public perceptions of crime seriousness. *British Journal of Criminology*. 36: 299-318
- O'Hara, E. A. (2005). Victim participation in the criminal process. *Journal of Law And Policy*, 13, 229- 247.
- Okimoto, T. G., Wenzel, M., & Feather, N. T. (2009). Beyond retribution: Conceptualizing restorative justice and exploring its determinants. *Social Justice Research*, 22, 156-180.

- Oldfather, C. M. (2007). Judges as humans: interdisciplinary research and the problems of institutional design. *Legal Studies Research Paper Series*, 1-24.
- Pachur, T., & Hertwig, R. (2006). On the psychology of the recognition heuristic: Retrieval primacy as a key determinant of its use. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 32, 983–1002.
- Page, A. D. (2008). Judging women and defining crime: Police officers attitude toward women and rape. *Sociological Spectrum*, 28: 389–411.
- Pennington, J., & Schlenker, B. R. (1999). Accountability for Consequential Decisions: Justifying Ethical Judgments to Audiences. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 25. 1067-1081.
- Pollard, P. (1992). Judgment about victim and attackers in depicted rapes: A Review. *British Journal of Social Psychology*. 31. 309-326.
- Probowati, Y. R. (2001). Recusitur jaksa penuntut umum dan kepribadian otoritarian hakim dalam proses Pemidanaan di Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Probowati, Y. R. (2005). *Dibaiik Putusan Hakim; Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Sidoarjo: CV Citramedia.
- Probowati, Y. R. (2007). Hubungan Kepribadian Otoritarian Dengan Pemidanaan Hakim. *Psikologika*, 91-96.
- Probowati, Y. R. (2008). Peran psikologi dalam investigasi kasus tindak pidana, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1, 26-31.
- Purba, R. (2010). Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Perkara Di Pengadilan *Makalah*, dipresentasikan pada Temu Ilmiah & Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia
- Putri, N. M. (2001). Keputusan Hakim dalam perkara anak yang melanggar hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6, 56-71.
- Rasunto, B. (2005). *Keadilan Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka.
- Reed, S. K (2011) *Kognitif: Teori dan Aplikasi (terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Redelmeier, D. (2005). The cognitive psychology of missed diagnosis. *Annals of Internal Medicine*, 142, 115-120.

- Remer, R., & Elliott, J. E. (1988). Characteristics of secondary victims of sexual assault. *International Journal of Family Psychiatry*, 9, 373-387.
- Ritov, I. (1996). Anchoring in simulated competitive market negotiation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 67, 16-25.
- Rogers, D. L. (2004). Struktural Analisis of Treatmen and Punishment Attitudes toward Offenders. *Disertasion* Ohio: The Ohio State University.
- Rossi, P. H., Simpson, J. E., & Miller, J. L. (1985). Beyond crime seriousness: Fitting the punishmeny to the crime. *Journal Quantitative Criminology*, 1, 59-90.
- Rumelhart, E. D. (1984) Schemata and Cognitive System. In R. S. Wyer & T. K. Srull (Eds) *Handbook of Social Cognition*. Hilldare NJ. Lawrence Erlbaum.
- Russell, B. L., & Melillo, L. S. (2006). Attitudes Toward Battered Women Who Kill: Defendant Typicality and Judgments of Culpability. *Criminal Justice and Behavior*, 33, 219-241.
- Russell, D. E. (1983). The prevalence and incidence of forcible rape and attempted rape of females. *Victimology: An International Journal*, 7, 1-4.
- Ryckman, R. M., Burn, M. J., & Robbins, M. A. (1989). Authoritarianism and sentencing strategies for low and high severity crime. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 12, 227-235. .
- Sakallı-Uğurlu, N., Yalçın, Z. S., & Glick, P. (2007). *Ambivalent sexism*, belief in a just world, and empathy as predictors of turkish students' attitudes toward rape victims. *Sex Roles*, 57, 889–895.
- Sample, L. L., & Bray, T. M. (2003). Are Sex Offenders Dangerous? *Criminology and Public Policy*, 3, 59-82.
- Schauben, L. J., & Frazier, P. A. (1995). Vicarious trauma: The effects on female counselors of working with sexual violence survivors. *Psychology of Women Quarterly*, 19, 49-64.
- Schklar, J., & Diamond, S. (1999). Juror Reactions to DNA evidence: Errors and expectancies. *Law and Human Behavior*, 23, 159-184.
- Serajzadeh, S. H. (2008). Social Determinants of the Seriousness of Crime: An Examination of a Muslim Sample. *Social Compass*, 55; 541-560.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Champbell, D. T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs For Generalized Causal Inference*. Boston: Houghton Mifflin Company.

- Shah, A., & Oppenheimer, D. (2008). Heuristics made easy: An effort-reduction framework. *Psychological Bulletin*, 134, 207-222.
- Shaw, I. J., & Skolnick, P. (2005). Effect of psycholegal knowledge on decision making by mock juries. *Applied Psychology in Criminal Justice*, 1, 90-109.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Simon, L. M. J. (2000). An examination of the assumptions of specialization, mental disorder, and dangerousness in sex offenders. *Behavioral Sciences and the Law*, 18, 275-308.
- Sims, B. (2003). The impact of causal attribution on correctional ideology: A national study. *Criminal Justice Review*, 28, 1-25.
- Smith, H. (2002). Thinking about *deservingness* . *Social Justice Research*, 15, 409-422.
- Smith, E.D & Hed, A (1979) Effects of offender age and attractiveness on sentencing by mock juries. *Psychological Report*. 44: 691-694
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Sorensen, R.A., (1992) *Thought Experiments*, Oxford: Oxford University Press.
- Stalans, L. J., & Lurigio, A. J. (1990). Lay and professionals' belief about crime and criminal sentencing: A need for theory, perhaps schema theory. *Criminal Justice Behavior*, 17 333-349.
- Steffensmeier, D. (1980). Assessing the impact of the women's movement on sex-based differences in the handling of adult criminal defendants. *Crime and Delinquency*, 26, 344-357.
- Steffensmeier, D., & Demuth, S. (2000). Ethnicity and sentencing outcomes in U.S. federal courts: Who is punished more harshly? *American Sociological Review*, 65, 705-729.
- Steffensmeier, D., & Demuth, S.. (2001). Ethnicity and judges' sentencing decisions: Hispanic-black-white comparisons. *Criminology*, 39, 145-178.
- Steffensmeier, D., Kramer, J., & Streifel, C. (1993). Gender and imprisonment decisions. *Criminology*, 31, 411-444.

- Steffensmeier, D., Ulmer, J., and Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. *Criminology*, 36, 763-797
- Sternberg, R. J. (2008). *Psikologi Kognitif (terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Spohn, C., & Holleran, D. (2000). The imprisonment penalty paid by young, unemployed, black and Hispanic, male offenders. *Criminology*, 38, 281-306.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sun, I. Y., & Wu, Y. (2006). Citizens perceptions of the court; the impact of race, gender and recent experience. *Journal of Criminal Justice*, 34, 457-467.
- Sunstain, C. R. (2004). Moral Heuristics. *Behavioral and Brain Sciences* (in press)
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & O'Sear, D. O. (2009). *Psikologi Sosial (Terjemahan)*. Jakarta: Kencana.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Tonry, M. (2004). Crime. In G. Ritzer, *Handbook of Social Problem: A Comparative International Perspective* (pp. 465-479). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Tsoudis, O. (2000). Does majoring in criminal justice affect perceptions of criminal justice? *Journal of Criminal Justice Education*, 11, 225-236.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky, *Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases* (pp. 1124-1131). New York: Cambridge University Press.
- Tyler, T. (1996). Public Attitudes on Criminal Justice. *Criminal Law Forum*, 7, 196-701.
- Tyler, T. (2001). Public trust and confidence in legal authorities; What do majority and minority want the law and legal authorities? *Behavioral Science and The Law*, 19 215-235.
- Tyler, T. (2006), Restorative justice and procedural justice: dealing with rule breaking. *Journal of Social Issues*, 62: . 307—326
- Tyler, T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., & Huo, Y. J. (1997). *Social justice in a diverse society*. Boulder, CO: Westview.

- Tyler, T & Huo, Y.J (2002), *Trust the law; Encouraging public with police and court*. New York: Russel-Sage.
- Unicef Indonesia (2006). *Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef.
- Urban, J.M., Weaver, J.L, Bowers, C.A, Rhodenizer, L. (1996). Effects of workload and structure on team processes and performance: implications for complex team decision making. *Human Factors* 38,300–10
- Veneziano, C., & Veneziano, L. (2002). Adolescent sex offenders: A review of the literature. *Trauma Violence & Abuse*, 3, 247-260.
- Vidmar, N & Miller D. (1980). Sociopsycological proceses underlying attitude toward legal punishment. *Law and Society Review*. 14; 565-602
- Vidmar, N. (2001). Retributive Justice: Its Social Context. In M. Ross, & D. Miller, *The Justice Motive in Everyday Life* (pp. 1-18). Cambrige: Cambridge U Press.
- Viki, G. T., & Abrams, D. (2002). But She Was Unfaithful: *BenevolentSexism* and Reactions to Rape Victims Who Violate Traditional Gender Role Expectations. *Sex Role*, 47, 289-293.
- Vizard, E., Hickey, N., & McCrory, E. (2007). Developmental trajectories associated with juvenile sexually abusive behavior and emerging severe personality disorder in childhood: 3-years study. *British Journal of Psychiatry*, 190, 27-32.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Walker, J., Archer. J., & Davies., M. 2005. Effect of male rape and psychological fungsioning. *British Journal of Clinical Psychology*. 445
- Walsh, A. (1984). Gender-based differences: A study of probation officers'attitudes about, and recommendations for, felony sexual assault cases. *Criminology; An Interdisciplinary Journal*, 22, 371-387.
- Ward, T., Polaschek, D. L. L., & Beech, A. R. (2006). *Theories of sexual offending*. Chichester, UK: Wiley.
- Wasco, S. M., & Campbell, R. (2002). Emotional reactions of rape victim advocates: A multiple case study of anger and fear. *Psychology of Women Quarterly*, 26, 120-130.
- Weiner, B. (1996). Searching for order in social motivation. *Psychological Inquiry*, 7, 199-216.

- Wenzel, M., Okimoto, T. G., Feather, N. T., & Platow, M. J. (2008). Retributive and restorative justice. *Law and Human Behavior*, 32, 375–389.
- Wheeler, S., Weisburd, D. & Bode, N (1982). Sentencing the white collar offender: Rhetoric and Reality. *American Sociological Review*. 47. 641-659.
- White, B. H., & Kurpius, S. E. (2002). Effects of Victim Sex and Sexual Orientation on Perception of Rape. *Sex Role*, 46, 191-200.
- Whitley Jr, B. E. (1999). Right Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77 126-134.
- Yamawaki, N., Darby, R & Queiroz, R. (2007) The moderating role of *Ambivalent sexism*: The influence of power status on perception of rape victim and rapist. *The Journal of Social Psychology*. 147: 41-56